

PETERNAKAN SAPI

## Warga Kepulauan Aru Tolak Investasi Swasta

**AMBON, KOMPAS** — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan izin lokasi seluas 61.567 hektar untuk usaha peternakan sapi yang akan dikerjakan oleh empat perusahaan. Namun, warga menolak kehadiran investasi itu karena dinilai mengancam kehidupan mereka baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun lingkungan.

Koordinator Save Aru Mika Ganobal, Minggu (5/7/2020), mengatakan, wacana investasi peternakan sapi disampaikan oleh Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja sebagai Menteri Pertanian ke Kepulauan Aru pada Oktober 2017. Pemkab Kepulauan Aru pada Juli 2019 mengeluarkan izin lokasi yang masuk dalam wilayah 12 desa di dua kecamatan di Pulau Terangan. Pulau dengan luas 2.300 kilometer persegi itu sebagian besar rawa-rawa dan banyak selat kecil.

Menurut Mika, Pulau Terangan tidak cocok untuk areal investasi peternakan sapi. Warga di sana masih hidup bergantung pada hasil alam. Jika lahan dikonversi menjadi areal peternakan, mereka akan kehilangan sumber penghidupan.

Kehadiran investasi di Pulau Terangan juga dinilai mengancam

ekosistem satwa endemik. Beberapa jenis cenderawasih dan kakatua hidup di sana.

"Kepulauan Aru merupakan bagian dari bentang ekologi Papua dengan kemiripan satwanya. Itu semua dijaga oleh masyarakat dan dijadikan destinasi wisata seperti saat musim cenderawasih menari," katanya.

Selain itu, wilayah daratan tersebut terbentuk dari batuan karst dengan solum tanah yang tipis. Jika dirusak, butuh waktu ribuan tahun untuk mengembalikan ekosistem hutan.

Sumur-sumur karst di sana juga menopang ketersediaan air tawar. Wilayah kepulauan Aru termasuk yang paling kesulitan mengakses air bersih. Mereka kebanyakan mengandalkan air payau yang digali di tengah laut pada saat air surut.

"Kami menolak hadirnya peternakan sapi dan investasi lain yang merusak tatanan alam, ekonomi, sosial, dan budaya di Aru," kata Mika.

Pada Jumat (3/7) lalu, sejumlah tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda datang menemui pimpinan Komisi I DPRD Kepulauan Aru. Mereka DPRD menyampaikan aspirasi agar pemkab membatalkan izin tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Samuel Irmupli berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Penolakan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna. Mereka akan memanggil pemerintah untuk meminta penjelasan.

Dolfintje Gaelagoy, tokoh perempuan Aru, mengatakan, penolakan dilakukan sejak 2017. Bahkan, perempuan adat Aru telah menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kemudian melakukan investigasi pada April 2018.

Hingga Minggu malam, Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga belum bisa dihubungi. Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Kepulauan Aru Erens Pieter Kalorbobir lewat telepon mengatakan, belum ada tindak lanjut dari wacana investasi peternakan sapi. Wacana itu terhenti menyusul muncul penolakan dari masyarakat.

Sementara itu, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, Ruslan Tawari berpendapat, wilayah Kepulauan Aru perlu ditata sebagai sentra perikanan nasional. Wilayah yang berada di Laut Arafura itu kaya hasil laut seperti ikan, udang, kepiting, dan teripang. (FRN)